

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan dengan berlandaskan asas otonomi. Sejak menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia langsung menerapkan asas otonomi pada kehidupan bernegara dengan daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang Undang 1945 pada pasal 18 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari uraian tersebut maka, penerapan asas otonomi dalam jalannya pemerintahan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka pemerintah pusat tidak mengalami kesulitan dalam mengelola dan membangun Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat telah membagikan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah (desentralisasi). Beranjak dari peraturan tersebut, diharapkan pemerintah mampu mencapai tujuan yaitu kesejahteraan umum, menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah masyarakat secara efisien dan efektif (Rumokoy, 2013). Oleh karenanya, peranan otonomi daerah mampu membantu pembangunan dan kelancaran dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Didalam menjalankan roda pemerintahan daerah, terdapat aktivitas pelayanan publik antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan. Pelayanan publik tersebut adalah pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan (Negara, 2016). Kegiatan

pelayanan publik sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri yang tidak mampu didapatkan secara mandiri pada pasar, seperti perijinan, pembuatan tanda identitas penduduk. Dari sebab itu, maka aktivitas pelayanan publik pada kantor pemerintah daerah mampu membantu kelangsungan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Didalam era modern seperti sekarang, permasalahan pelayanan publik pada saat ini masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut sudah terjadi sejak pergantian kepemimpinan presiden hingga saat ini. Apabila dilihat dari pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia memiliki kekurangan yaitu, kurang informatif, kurang koordinasi, berbelit, dan tidak responsif terhadap saran, masukan (Mahsyar, 2011). Selain itu banyak pula penyelenggara pemerintah yang belum mengetahui mengenai peraturan mengenai pelayanan publik (Hidayat, 2018). Hal tersebut apabila dibiarkan mampu menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan, apabila dapat diperbaiki dengan baik maka mampu memperbaiki perekonomian dan keberlangsungan kehidupan dari masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pelayanan publik pada saat ini masih ada, terus dibenahi oleh pemerintah

Dalam era modern seperti sekarang, masyarakat cenderung berusaha memenuhi kebutuhannya secara instan atau cepat. Guna mendukung aktivitas pelayanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah berusaha melakukan inovasi guna meningkatkan aktivitas pelayanan publik baik dari pusat hingga tingkat daerah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dengan membentuk pusat pelayanan publik terpadu satu atap dan satu pintu. Pelayanan terpadu satu atap merupakan aktivitas pelayanan publik berada pada satu gedung atau tempat, dimana masing-masing instansi yang ada bekerja sesuai dengan bidang fungsinya. Pelayanan terpadu satu pintu adalah aktivitas pelayanan publik dikelola oleh satu dinas pemerintah berdasar pada pelimpahan kewenangan dari unit kerja pemerintah lainnya yang saling berkaitan (Nugroho, 2018). Dari adanya inovasi pada pelayanan publik tersebut, maka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang disediakan pemerintah untuk masyarakat.

Salah satu bentuk dari pusat pelayanan publik satu atap dan satu pintu yang pada saat ini dikenal dengan istilah Mal Pelayanan Publik. Menurut Permen PAN-

RB Nomor 23 Tahun 2017, pengertian dari mal pelayanan publik adalah tempat berlangsungnya pelayanan publik atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Mal Pelayanan Publik memiliki tujuan yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan kepada masyarakat dalam meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.



Gambar 1. 1 Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta

Sumber: <http://syaifuddin.com/ribetnya-perpanjangan-paspor-online/>

Diunduh pada: 21 Maret 2019

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang terdapat di Negara Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 (lima) daerah otonom yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan daerah otonom yang memiliki perbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Sleman berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah pada bagian utara. Pada bagian tenggara dari Kabupaten Sleman terdapat Kabupaten Gunung Kidul. Kota Yogyakarta terdapat pada bagian selatan dari Kabupaten Sleman.



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/peta> ,

Diunduh pada : 1 Maret 2019

Pusat dari pemerintahan daerah Kabupaten Sleman terdapat di daerah Beran, Sleman, Yogyakarta. Lokasi dari kantor masing-masing dinas atau instansi pemerintah tersebut, tersebar pada kawasan sekitar Jalan Parasomya.. Hal tersebut dapat menjadi masalah kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat untuk mengurus keperluan pelayanan publik, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan ktidakefektifan dan efisiennya pelayanan publik.

Permasalahan pertama yang menjadi perhatian adalah tidak efektif dan efisien. Ketidakefektifan dan efisien sebuah pelayanan publik, permasalahan yang umum terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Kemajuan teknologi informatika dan telekomunikasi telah membantu masyarakat dan pemerintah diberbagai lini kehidupan. Akan tetapi, apabila tidak terkait dan terpadu secara optimal antar satu bidang dengan bidang lainnya, maka akan mengakibatkan ktidakefisien dan efektif dalam melakukan pelayanan publik. Oleh karena itu, aspek efektif dan efisien dalam pelayanan publik memiliki peran yang sangatlah penting.

Permasalahan kedua adalah lokasi atau letak pasti kantor dinas yang ingin dituju oleh masyarakat. Permasalahan lokasi dari kantor dinas dapat diatasi

apabila seluruh kantor dinas pada Kabupaten Sleman memiliki sebuah bangunan induk yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu antar dinas. Dengan demikian, seluruh pelayanan publik pada Kabupaten Sleman mampu untuk dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan dalam mencari lokasi pasti kantor dinas yang ingin dituju. Oleh karena itu, peranan lokasi atau letak bangunan pelayanan publik memiliki peran yang sangatlah penting.

Pada saat ini, di Kabupaten Sleman terdapat kantor pelayanan publik satu atap yang berada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Kantor dinas tersebut terletak pada Jalan Magelang, Beranlor, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor pelayanan publik yang nantinya akan menjadi pusat pelayanan publik tersebut pada saat ini sudah mulai berjalan bertahap, karena secara bersamaan sedang dilakukan proses perbaikan pada bangunan kantor yang lama, sehingga dapat beroperasi penuh pada HUT Kabupaten Sleman pada tanggal 15 Mei 2019. Sebagai fungsi baru yang menggunakan bangunan lama, maka terdapat berbagai kekurangan yang terdapat pada kantor pelayanan terpadu ini. Selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut mengenai kekurangan yang terdapat pada bangunan pelayanan publik terpadu tersebut.

Kekurangan pertama adalah pencapaian menuju bangunan yang terhalangi bangunan disekitarnya. Tapak dari kantor pelayanan publik sementara tersebut berada didalam permukiman warga. Sedangkan untuk akses menuju bangunan tersebut cukup untuk dapat dilewati kendaraan kendaraan roda empat yang masuk atau keluar secara bersamaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pencapaian menuju kantor pelayanan publik sementara tersebut, memiliki kekurangan yang dapat mengganggu berjalannya fungsi bangunan tersebut.

Kekurangan kedua adalah penggunaan bangunan lama sebagai bangunan kantor pelayanan publik. Pada saat ini pada bangunan Gedung Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sedang dilakukan perbaikan dalam rangka mendukung fungsi bangunan sebagai kantor pelayanan publik. Perbaikan yang dilakukan berpusat pada perombakan tata ruang dalam bangunan. Hal tersebut memerlukan ketelitian dan kecermatan agar nantinya

bangunan yang sedang direnovasi tersebut dapat menampung pengunjung yang datang dan perbaikan fisik tersebut diharapkan tidak merusak dari sistem struktur bangunan lama yang telah berdiri. Hal tersebut disebabkan bangunan lama tersebut memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi yang lama, yang mengakibatkan perbedaan pada ruang dalam bangunan dan bentuk bangunan. Disimpulkan bahwa, dalam penggunaan bangunan lama sebagai kantor pelayanan publik meskipun telah dilakukan perbaikan, memerlukan perhatian khusus, sehingga dapat mendukung fungsi baru sebagai tempat pelayanan publik.

Tapak dari kantor pelayanan publik sementara tersebut berada ditengah permukiman warga. Aksesibilitas pencapaian menuju bangunan tersebut hanya cukup untuk dapat dilewati dua kendaraan roda empat yang masuk atau keluar secara bersamaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat kekurangan dari lokasi dan gedung lama yang saat ini digunakan untuk tempat pusat pelayanan publik satu atap secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pusat pelayanan publik satu atap bagi seluruh kantor-kantor dinas pemerintahan ataupun instansi pemerintahan di Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjadi solusi yang sesuai. Pusat pelayanan publik tersebut diharapkan mampu menjadi wadah pelayanan publik yang mewadahi pelayanan yang efektif dan efisien, memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat baik yang tinggal didalam atau diluar dari Kabupaten Sleman, serta memiliki fasilitas utama dan pendukung kegiatan pelayanan publik yang mampu mendukung kegiatan pelayanan publik secara optimal. Dari uraian tersebut maka, diharapkan pelayanan publik pada Kabupaten Sleman mampu menjadi lebih baik, lebih maju dan berdaya saing global sehingga mampu memajukan Kabupaten Sleman.

1.1.2 Latar Belakang Permasalahan

Sebuah bangunan pusat pelayanan publik memiliki peran yang penting dalam rangka untuk melayani masyarakat dan memberikan kemudahan bagi pihak untuk mengurus berkas perijinan yang diperlukan. Pusat pelayanan publik adalah bangunan pelayanan publik yang berfungsi sebagai wadah kegiatan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman kepada masyarakat. Terdapat tiga aspek penting yaitu pelayanan yang cepat, mudah dan nyaman, yang

mampu digunakan sebagai kelebihan dari adanya mal pelayanan publik tersebut. Pelayanan publik yang cepat akan terjalin apabila terbangun sebuah kerja sama tim didalam internal organisasi, sehingga memberikan hasil yang baik kepada pengguna layanan (Negara, 2016). Pelayanan publik yang mudah yang dimaksud adalah dalam sebuah pelayanan publik, masyarakat sebelumnya wajib memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan masuk akal dan mampu untuk dipenuhi. Pelayanan publik yang nyaman adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat baik mekanisme atau prosedur pelayanan, fasilitas penyelenggaraan pelayanan, dan biaya pelayanan. Oleh karena itu, dengan adanya Pusat pelayanan publik di Kabupaten Sleman diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan barang dan jasa dengan pemerintah serta meningkatkan persaingan global dunia sekarang.

Dalam melakukan perancangan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman tersebut, diperlukan sebuah pendekatan desain khusus guna menghasilkan rancangan bangunan pusat pelayanan publik yang fungsional. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan tata ruang dalam bangunan, yang memberi kejelasan serta kelancaran sirkulasi pengunjung pusat pelayanan publik publik.

Menurut (Mangunwijaya, 1988) pengelolaan tata ruang yang baik dalam bangunan, mampu mendukung dari nilai penting suatu bangunan yaitu, nilai citra dan guna yang baik. Tata atur dalam perancangan dan perencanaan sebuah bangunan merupakan suatu seperangkat unsur-unsur yang saling bergantung dan berkaitan satu dengan lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan bersama (White E. T., 1986). Di dalam melakukan tata atur dalam perencanaan dan perancangan, terdapat tiga unsur penting yaitu unsur (hal yang akan diatur), kualitas (sifat dari unsur) dan kriteria (cara pengaturan dari kualitas unsur) (White E. T., 1986). Di dalam perencanaan dan perancangan bangunan pelayanan publik satu atap tersebut, terdapat beragam dinas atau instansi pemerintah daerah yang akan disatukan tempat pelayanannya menjadi satu tempat. Selain itu, terdapat puluhan jenis bentuk pelayanan publik yang tersedia. Dari sebab itu, bangunan pelayanan publik satu atap wajib memperhatikan tata atur ruang dalam yang baik.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan bangunan yang komunikatif, fungsional dan nyaman bagi pengunjung yang datang.

Dalam rangka mengidentifikasi karakter bangunan pusat pelayanan publik yang akan dirancang, maka diperlukan studi preseden terkait. Dalam studi preseden ini bangunan yang memiliki kesamaan fungsi dan karakter pelayanan publik di Indonesia saat ini adalah Mal Pelayanan Publik. Berikut adalah studi preseden mal pelayanan publik yang sudah ada di Indonesia.

Tabel 1. 1 Analisis Mal Pelayanan Publik yang sudah ada di Indonesia.

No	Mal Pelayanan Publik yang sudah ada.	Jumlah Lantai Bangunan	Instansi yang bergabung	Jumlah perizinan	Zonasi per lantai.
1	MPP DKI Jakarta	12, Lantai 1 -3 untuk Pelayanan, lantai 4-12 sebagai <i>back office</i> .	18	330 (baik perizinan maupun non perizinan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai 1 <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Pembangunan b. Izin aktivitas usaha c. <i>Fast track service</i> d. <i>Pick up counter</i> 2. Lantai 2 <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Pertanahan b. Layanan AJIB c. <i>Priority service</i> d. <i>Consultation room</i> 3. Lantai 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Dirjen Pajak b. Dirjen Bea dan Cukai c. Dirjen Imigrasi d. Dirjen Administrasi Hukum Umum e. Kepolisian f. PLN Distribusi Jakarta Raya g. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta h. Dinas Kependudukan

					<p>dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta</p> <p>i. Kanwil DKI Jakarta</p> <p>j. Bank DKI</p> <p>k. Jasa Raharja</p> <p>l. BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>m. BPJS Kesehatan</p> <p>4. Lantai 4-12 <i>Back office</i></p>
2	MPP Surabaya	3	21	154	<p>1. Lantai 1</p> <p>a. UPTSA</p> <p>b. Pelayanan Dispendukcapil</p> <p>c. Museum</p> <p>d. SIM corner</p> <p>e. PDAM</p> <p>f. Perbankan</p> <p>g. Pajak</p> <p>h. Sentra UKM</p> <p>i. Pijat Tuna Netra</p> <p>2. Lantai 2</p> <p>a. Disperindag</p> <p>b. Meeting Hall</p> <p>c. Command Center</p> <p>d. Disbudpar</p> <p>e. UPT Metrologi</p> <p>f. Taman gantung</p> <p>g. Musholla</p> <p>3. Lantai 3</p> <p>a. Dispora</p> <p>b. BKPM</p> <p>c. Dispendukcapil</p> <p>d. Meeting Hall</p> <p>e. <i>Co-working Space</i></p>
3	MPP Banyuwangi	3, Lantai 1 untuk kegiatan pelayanan, lantai 2 dan 3 belum digunakan.	-	199	<p>1. Lantai 1 Tempat Pelayanan publik.</p> <p>2. Lantai 2 dan 3 Akan dikembangkan pada tahun 2019</p>

Sumber: Analisis Penulis, diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil analisis ketiga Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah ada tersebut, terdapat beberapa kesamaan ruang yang tersedia diantara ketiga MPP tersebut. Pertama, ketiga MPP tersebut terdapat pada bangunan yang memiliki 3 buah lantai yang berfungsi sebagai tempat pelayanan publik dan aktivitas masyarakat. Kedua, pada masing-masing MPP menyediakan fasilitas tambahan bagi publik seperti *co-working space*, tempat bermain anak, fasilitas pijat, musholla. Oleh karena itu, hasil analisis ketiga Mal Pelayanan Publik tersebut dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan perancangan bangunan Pusat Pelayanan Publik Satu Atap di Kabupaten Sleman.

Terkait dengan tingginya jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan pelayanan publik, atau masyarakat yang berkunjung dengan keperluan tertentu hingga aktivitas pegawai pemerintah, maka diperlukan penataan ruang dalam yang jelas dalam bangunan Pusat Pelayanan Publik Satu Atap Kabupaten Sleman. Penataan ruang tersebut berdasarkan kriteria (zonasi ruang dan organisasi ruang) dan aktivitas pelayanan publik yang ada didalamnya, sehingga mampu memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat yang datang. Oleh karena itu, diharapkan dengan penataan ruang dalam yang jelas mampu menciptakan mendukung bangunan Pusat Pelayanan Publik Satu Atap yang efisien dan efektif, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang direncanakan.

Selanjutnya, didalam mewujudkan perancangan bangunan Pusat Pelayanan Publik Satu Atap Kabupaten Sleman, diperlukan pendekatan perancangan yang terbaik dalam merancanganya. Bangunan Pusat Pelayanan Publik tersebut merupakan bangunan yang menjadi bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Lokasi tapak yang direncanakan berada disekitar pusat pemerintahan daerah Kabupaten Sleman. Pada pusat pemerintahan daerah Kabupaten Sleman terdapat bangunan pemerintahan yang telah ada yang terdapat antara lain, Kantor Bupati Sleman, Gedung DPRD Kabupaten Sleman, Bappeda Sleman, dan Kejaksaan Negeri Sleman. Berikut adalah bangunan pemerintahan yang terdapat di kawasan Jalan Parasamy, Beran, Sleman, Yogyakarta.



Gambar 1. 3 Kantor Bupati Sleman

Sumber: <https://www.bernas.id/27081-sleman-terima-dua-penghargaan-tingkat-nasional.html>,
diunduh pada 14 Maret 2019



Gambar 1. 4 Kantor BAPPEDA Kabupaten Sleman

Sumber: <https://dilokasi.com/Yogyakarta/Places/Kantor-Bappeda-Kab-Sleman-571951>
diunduh pada 14 Maret 2019



Gambar 1. 5 Gedung DPRD Kabupaten Sleman

Sumber: *Google earth.*

Berdasarkan hasil pengamatan, bangunan pemerintahan yang terdapat pada sekitar tapak, memiliki gaya arsitektur dan unsur tradisional Jawa. Seperti pada bangunan Kantor Bupati Sleman dan Gedung DPRD Sleman, terdapat bangunan Joglo yang berfungsi sebagai aula pertemuan. Pada bangunan pemerintah tersebut juga memiliki bentuk atap limasan dan joglo yang merupakan atap tradisional Jawa dan respon terhadap kondisi iklim tropis di Indonesia. Selain itu, terdapat ornamen-ornamen dari kayu dan material lainnya yang merupakan ciri khas tradisional Jawa. Oleh karena itu, sebagai suatu bangunan pemerintahan baru, sebaiknya dalam perancangan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman diperlukan keselarasan antar bangunan lama dengan baru, dan aspek kontekstualitas dengan lokasi dari bangunan tersebut nantinya berada.

Hal tersebut yang menjadi dasar pemilihan dari pemilihan pendekatan arsitektur kontekstual pada bangunan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman. Pendekatan tersebut dipilih dengan tujuan agar tercapai keselarasan antara bangunan-bangunan disekitar lokasi tapak, dengan bangunan baru tersebut. Dalam menghasilkan bangunan yang memiliki pendekatan arsitektur kontekstual, dapat diraih dengan berbagai cara. Menurut (Brolin, 1980) terdapat beberapa cara sebagai usaha untuk membentuk visual yang sesuai antara bangunan baru dengan sekitarnya (Herliana, 2013). Adapun cara tersebut adalah, mengambil motif bangunan yang sudah ada, mengambil bentuk dasar bangunan yang sama lalu dilakukan perubahan, dilakukan pengembangan bentuk dan pola baru yang memiliki efek visual mirip dengan bentuk lama, dan mengabtraksikan bentuk asli (Herliana, 2013). Dari sebab itu, penerapan pendekatan arsitektur kontekstual diharapkan mampu menghasilkan suatu bangunan pemerintahan yang memiliki keselarasan dengan bangunan pemerintahan disekitarnya dan memperhatikan aspek kontekstual dari lokasi bangunan tersebut direncanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana wujud perancangan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman sebagai suatu bangunan yang memperhatikan penataan ruang dalam yang terbagi dalam zonasi ruang, organisasi ruang dan sirkulasi pelayanan yang jelas, dengan berdasarkan pendekatan arsitektur kontekstual?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah mewujudkan landasan konseptual dari perencanaan dan perancangan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang memperhatikan tata ruang dalam yang terbagi dalam, zonasi ruang, organisasi ruang dan sirkulasi pelayanan yang jelas, dengan berdasarkan pendekatan arsitektur kontekstual sebagai topik penekanan desain dalam penulisan.

1.3.2 Sasaran

Berikut terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tentang kegiatan pelayanan publik yang baik.
- b. Mengidentifikasi bangunan pusat pelayanan publik yang meliputi: pengertian, fungsi, tujuan, ciri-ciri, fasilitas yang tersedia dan permasalahan yang terdapat pada mal pelayanan publik yang telah ada.
- c. Mengidentifikasi pelaku yang akan terdapat di pusat pelayanan publik, meliputi jenis-jenis kegiatan pelayanan publik, jumlah instansi atau dinas Kabupaten Sleman yang ingin bergabung dalam mal pelayanan publik, dan mengetahui jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan publik pada tiap instansi atau dinas tersebut.
- d. Mengidentifikasi besaran ruang yang diperlukan dan persyaratan ruang sesuai dengan standar fasilitas.
- e. Mengidentifikasi lokasi tapak dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan pada tapak bangunan.
- f. Menganalisis tapak dan pelaku.
- g. Mengidentifikasi tentang bentuk arsitektur dan unsur-unsur arsitektural khas Kabupaten Sleman yang mampu dimanfaatkan dalam perancangan bangunan.

1.4 Lingkup Studi

1.4.1 Materi Studi

a. Lingkup Spasial

Dalam penulisan ini, lingkup spasial yang akan diolah pada penekanan studi adalah penataan ruang dalam dari Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman.

b. Lingkup Substansial

Dalam penulisan ini, yang akan diolah pada penataan ruang dalam bangunan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman adalah organisasi ruang, *zoning* ruang, alur sirkulasi sesuai dengan kegiatan para pelaku pelayanan publik. Sedangkan pada ruang luar dari Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman yang akan diolah adalah bentuk dan fasad bangunan, ruang terbuka disekitar bangunan, kesesuaian massa bangunan dengan peraturan daerah terkait, alur sirkulasi kendaraan yang disesuaikan dengan pendekatan arsitektur kontekstual.

c. Lingkup Temporal

Bangunan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman diharapkan akan dapat menjadi penyelesaian penekanan studi untuk kurun waktu 10 tahun kedepan. Hal tersebut disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Sleman dan kondisi konstruksi bangunan sehingga bangunan tersebut mampu mewadahi kegiatan pelayanan publik secara maksimal dan baik.

1.4.2 Pendekatan Studi

Pada penulisan ini, penyelesaian penekanan studi pada Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman dilakukan dengan penataan ruang dalam bangunan dan ruang luar dengan pendekatan arsitektur kontekstual.

1.5 Metode Studi

1.5.1 Pola Prosedural

Langkah-langkah prosedural yang dilaksanakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan Tapak

Melakukan pengamatan pada lokasi tapak dimana bangunan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman tersebut direncanakan. Pengamatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai data mikro pada tapak seperti ukuran tapak, potensi tapak, vegetasi, kontur, kondisi sekitar tapak, dan akses menuju tapak. Informasi tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan digital ataupun sketsa manual.

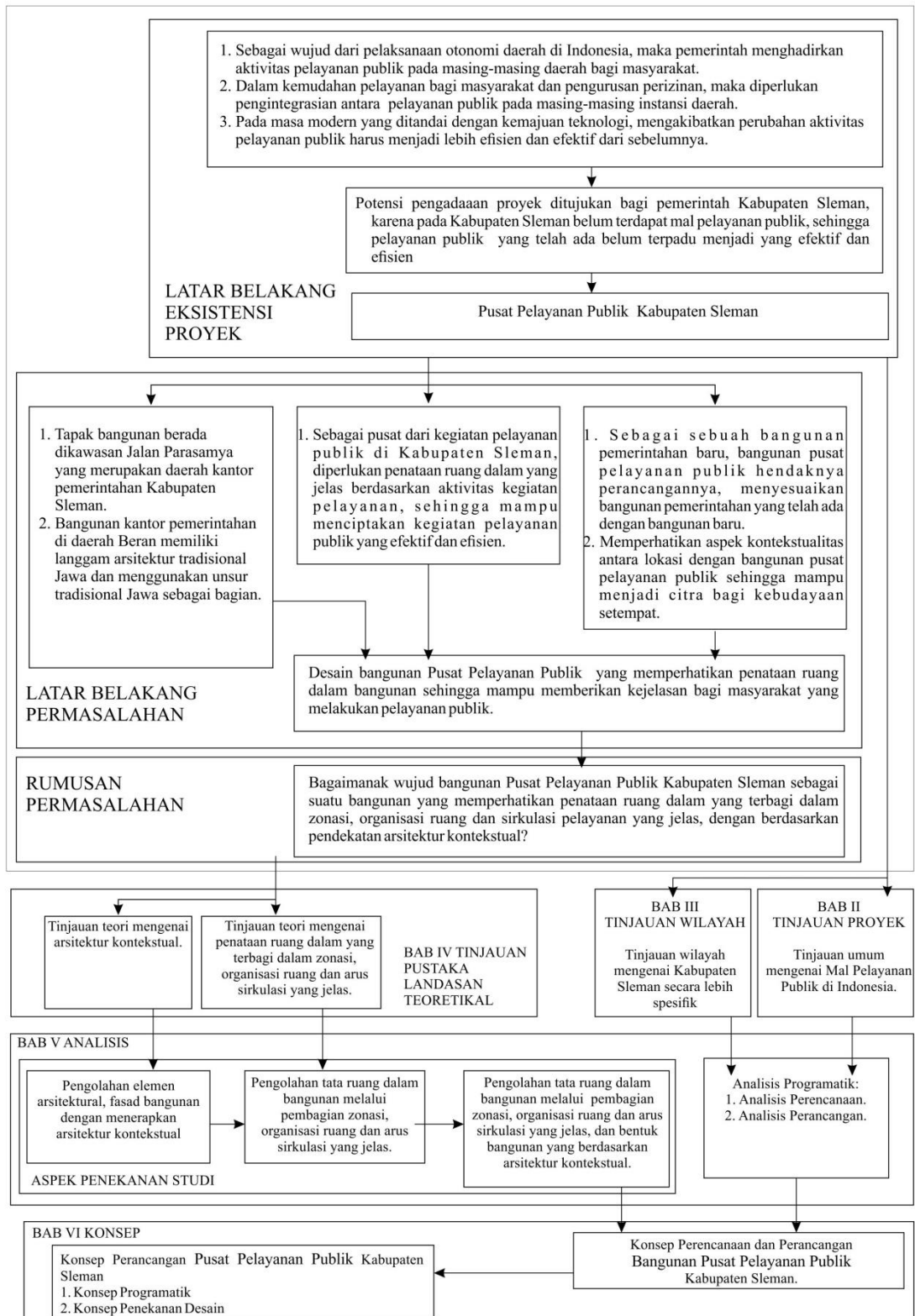
b. Studi Komparasi

Melakukan studi komparasi atau perbandingan pada bangunan pusat pelayanan publik satu atap yang telah ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan dalam melakukan perencanaan dan perancangan bangunan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman.

c. Studi Literatur

Melakukan studi literatur pada sumber literasi yang berkaitan dengan bangunan Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, aktivitas pelayanan publik yang baik, kebutuhan ruang yang diperlukan, standar kebutuhan ruang, literatur mengenai arsitektur kontekstual, dan unsur-unsur arsitektur tradisional Jawa yang terdapat di Kabupaten Sleman.

1.5.2 Tata Langkah



Gambar 1. 6 Tata Langkah Penulisan

Sumber: Dokumentasi Penulis

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, berisi tentang latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penulisan, lingkup pembahasan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua, berisi tentang paparan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek studi, yang berkaitan di dalam perencanaan dan perancangan obyek studi. Adapun hal-hal tersebut adalah pengertian dari obyek studi dan tipologi bangunan obyek studi, tinjauan terhadap obyek studi sejenis, dan hal-hal lainnya yang mampu memberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB III TINJAUAN KAWASAN

Pada bab ketiga, berisi paparan mengenai wilayah dan kondisi dimana obyek studi akan direncanakan dan dirancang. Adapun hal tersebut adalah tinjauan wilayah Kabupaten Sleman secara umum, baik secara administrasi dan geografis dan tinjauan mengenai kebudayaan dan keunikan yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu pada bab ketiga, akan dijabarkan mengenai data-data peraturan daerah Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan pembangunan, baik secara fisik bangunan atau non fisik.

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORITIKAL

Pada bab keempat, berisi tentang pengertian dari penataan tata ruang dalam yang baik, sesuai dengan zonasi ruang dan kriteria ruang, tinjauan tentang jumlah instansi atau dinas di Kabupaten Sleman yang akan bergabung di dalam bangunan Pusat Pelayanan Publik, tinjauan tentang bangunan yang saling terintegrasi sehingga mampu mewujudkan kelancaran dan kejelasan bagi penggunaan melalui pendekatan arsitektur kontekstual, dan tinjauan tentang pendekatan arsitektur kontekstual.

BAB V ANALISIS

Pada bab kelima, berisi tentang analisa yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan perancangan obyek studi. Adapun analisa yang

dilakukan adalah analisa pelaku, kegiatan, aktivitas, kebutuhan ruang yang sesuai standar ruang yang direkomendasikan, dan sarana-sarana yang diperlukan dalam perancangan obyek studi. Selain itu, terdapat analisa mengenai zonasi ruang, organisasi ruang , alur sirkulasi pengguna bangunan yang kemudian disesuaikan pada analisa tapak sehingga dihasilkan sintesa bangunan obyek studi.

BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Pada bab keenam, berisi tentang konsep-konsep perencanaan dan perancangan bangunan obyek studi yang disesuaikan dengan hasil dari analisis pada bab kelima. Konsep perencanaan mencakup pada garis besar dari konsep tapak, persyaratan perencanaan yang disesuaikan dengan peraturan daerah setempat, dan konsep penataan tapak. Adapun konsep perancangan adalah sintesa yang didapatkan dari segala analisis yang dilakukan pada bab kelima, sehingga didapatkan suatu solusi yang komprehensif bagi perwujudan bangunan obyek studi.